

TINGKAT PELAYANAN SARANA PERDAGANGAN DI WILAYAH PERMUKIMAN SUB-URBAN KOTA LUWUK

SERVICE LEVEL OF TRADE FACILITIES IN SUB-URBAN SETTLEMENT AREA, LUWUK CITY

Jufri Azis Masulili

Program Studi Arsitektur Universitas Tompotika Luwuk

email: jufriazismide@gmail.com

Abstrak

Sarana perdagangan dapat menunjang penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pelayanan sarana perdagangan di wilayah permukiman suburban Kota Luwuk. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui survei, wawancara, dengan menggunakan kuisioner. Populasi penelitian ini adalah kepala keluarga sebanyak sembilan puluh delapan kepala keluarga sebagai responden yang dipilih secara acak. Hasil analisis tingkat pelayanan sarana perdagangan berdasarkan jenis dan jumlahnya mencapai 46,6%, sedangkan berdasarkan radius pencapaian mencapai 50%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelayanan sarana perdagangan tidak memenuhi standar pelayanan minimal. Maka diperlukan peningkatan dan pengembangan sarana perdagangan sesuai dengan standar pelayanan sehingga dapat menunjang penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Kata kunci: Sarana perdagangan, tingkat pelayanan, area sub-urban

Abstract

Trade facilities can support the implementation and development of social, economic and cultural life. This study aimed to analyze the service level of trade facilities in the suburban area of Luwuk City. The research method used is quantitative and qualitative descriptive analysis. Data collection was carried out through surveys, interviews, using questionnaires. The population of this study was ninety-eight heads of families as respondents who were randomly selected. The analysis results of the service level of trading facilities by type and number reached 46.6%, while based on the achievement radius, it reached 50%. This shows that the service level of trade facilities needs to meet the minimum service standards. So it is necessary to improve and develop trade facilities in accordance with service standards to support the implementation and development of the community's social, economic and cultural life.

Keywords: Trade facilities, service level, sub-urban area

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk perkotaan dari waktu ke waktu, serta meningkatnya tuntutan kebutuhan kehidupan dalam aspek-aspek politik ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi telah mengakibatkan meningkatnya kegiatan penduduk perkotaan (Putra et al., 2022). Hal tersebut berakibat pada meningkatnya kebutuhan ruang kota yang besar (Prihatin, 2015). Oleh karena ketersediaan ruang di dalam kota tetap dan terbatas, maka

secara alamiah terjadi pemilihan alternatif dalam memenuhi kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan kedudukan fungsi-fungsi selalu akan mengambil ruang di daerah pinggiran kota (Warsono et al., 2009).

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk tersebut, sistem perkotaan akan berkembang (Nugroho et al., 2022), pendapatan penduduk akan semakin meningkat (Kolompoy et al., 2022) dan implikasinya tuntutan kebutuhan terhadap berbagai investasi prasarana dan sarana akan semakin tinggi (Arifin, 2014). Pembangunan kota tanpa prasarana dan sarana lingkungan akan menyebabkan timbulnya permasalahan dan dampak yang menambah beban pada pusat kota. Wunas, (2011) menjelaskan bahwa saat ini perkembangan atau perembetan kota-kota besar di Indonesia lebih mengutamakan pembangunan fungsional, cenderung dengan pola kota yang tidak terstruktur (*urban sprawl*) di wilayah sub-urban. Perkembangan kelompok perumahan permukiman terpisah dengan fasilitas publik seperti sarana perbelanjaan, sarana pendidikan, sarana perdagangan dan jasa lainnya, sehingga penghuni harus memenuhi kebutuhan dengan kendaraan bermotor, dengan jarak capai lebih dari 2.000 meter yang seharusnya tersedia dalam radius pelayanan 500-1.000 meter. Kota secara keseluruhan menjadi tidak nyaman bagi penghuni, karena jarak capai lebih panjang dan lebih lama untuk aktivitas sosial dan ekonomi.

Salah satu sarana permukiman yang menjadi perhatian dalam pembangunan dan mendapatkan pengaruh langsung akibat peningkatan penduduk yaitu sarana perdagangan (Dyah et al., 2010). Koestoer, (1997) menjelaskan bahwa penyelenggaraan fasilitas dimaksudkan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kualitas kehidupan yang layak. Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam kaitan dengan peningkatan sosial dan ekonomi, maka dibutuhkan jenis sarana perdagangan. Sarana perdagangan yang ada diharapkan dapat menghantar pada pembauran, artinya bukan penduduk daerah setempat yang dapat menikmati sarana tersebut, melainkan juga penduduk daerah belakang. Dengan demikian penyediaan ini dapat digunakan oleh beberapa lingkungan perumahan dan permukiman secara bersama.

Di wilayah permukiman sub-urban Kota Luwuk masih terlihat bahwa ketersediaan sarana perdagangan belum memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan skala pelayanan minimal, karena tidak mempertimbangkan kondisi daerah setempat, terutama terhadap jumlah penduduk lokal, pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada, sedangkan penempatan penyediaannya tidak mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Selain itu juga perkembangan kelompok permukiman terpisah dengan fasilitas publik, seperti sarana perdagangan dan perbelanjaan, sehingga penghuni harus memenuhi kebutuhan dengan kendaraan bermotor, dengan jarak dari 13 km meter. Hal ini sangat memprihatinkan, untuk itu diperlukan upaya yang sistematis dalam penyediaan sarana perdagangan di wilayah permukiman suburban Kota Luwuk sehingga tidak berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pelayanan sarana perdagangan di wilayah permukiman suburban Kota Luwuk.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah permukiman suburban Kota Luwuk Kabupaten Banggai, yang terdiri dari: (1) zona wilayah transisi perkembangan kota atau BWK D yaitu Desa Lumpoknya, Kilongan Permai, Kilongan; dan (2) zona wilayah cadangan kota atau BWK E, yaitu Desa Bumi Beringin, Awu, Boyou, Biak, dan Bunga. Karena perkembangan kelompok permukiman di wilayah tersebut terpisah dengan fasilitas publik seperti sarana perdagangan dan niaga, sehingga masyarakat harus memenuhi kebutuhan dengan kendaraan bermotor, dengan jarak capai rata-rata 8,25 km, yang seharusnya tersedia dalam radius

pelayanan 0,5-2 km. Kota secara keseluruhan menjadi tidak nyaman bagi penghuni, karena jarak capai lebih panjang dan lebih lama untuk aktivitas sosial dan ekonomi.

Populasi dan Teknik Sampel

Populasi adalah seluruh elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan dari objek penelitian (Noor, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang tinggal di wilayah permukiman suburban Kota Luwuk. Kepala keluarga yang dijadikan sampel, diharapkan akan menggambarkan proporsional secara keseluruhan, dengan menggunakan rumus Taro Yamane (Riduwan, 2010), total jumlah sampel dengan penentuan nilai presisi sebesar 10%, yaitu sebanyak 98 sampel.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini di bagi menjadi dua jenis sumber data yaitu: (1) data primer adalah data yang dihimpun dan diperoleh dari hasil observasi dan survei terhadap sarana perdagangan yang tersedia melalui lembar pengamatan dan masyarakat sebagai pengguna melalui wawancara dan kuesioner; (2) data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, literatur, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah dan berbagai sumber tertulis lainnya.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu untuk mengkaji ketersediaan dan tingkat pelayanan sarana perdagangan di wilayah permukiman suburban Kota Luwuk, apakah sarana perdagangan yang tersedia sudah memenuhi standar pelayanan minimal atau belum memenuhi. Analisis data tingkat pelayanan sarana perdagangan dengan menggunakan rumus; ketersediaan: $\frac{\text{kebutuhan}}{\text{jumlah}} \times 100\%$. Selanjutnya dicari rata-rata tingkat pelayanan dengan menggunakan rumus; tingkat pelayanan: $\frac{\text{jumlah sarana perdagangan}}{\text{jumlah}} \times 100\%$. Untuk menghasilkan pengukuran kuantitatif dan kualitatif digunakan skala Likert dengan pemberian skoring, sehingga dapat diketahui apakah tingkat pelayanan masuk kategori sangat memenuhi, memenuhi, cukup memenuhi atau tidak memenuhi..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis tingkat pelayanan sarana perdagangan di wilayah permukiman sub-urban Kota Luwuk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji ketersediaan dan tingkat pelayanan sarana perdagangan berdasarkan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat pelayanan sarana perdagangan digunakan indikator jenis dan jumlah sarana perdagangan, dan radius pencapaian. Berdasarkan hasil survei di lokasi penelitian, sarana perdagangan tersedia 35 unit warung, 69 unit toko, sedangkan sarana perdagangan seperti pertokoan, pusat pertokoan dan pasar lingkungan, serta pusat perbelanjaan dan niaga belum tersedia. Untuk indikator radius pencapaian warung dan toko $\pm 0,3$ km, sedangkan pertokoan, pusat pertokoan dan pasar lingkungan berada di pusat kota dengan jarak pencapaian rata-rata 8,25 km.

Tingkat pelayanan sarana perdagangan menurut jenis dan jumlahnya seperti warung mencapai 60%, toko mencapai 126,7%, pertokoan, pusat pertokoan dan pasar lingkungan belum tersedia, sehingga rata-rata tingkat pelayanan sarana perdagangan hanya mencapai 46,6%. Untuk pusat perbelanjaan dan niaga penyediaannya belum diharuskan karena jumlah penduduk belum mendukung. Sedangkan radius pencapaian warung dan toko berada di tengah kelompok tetangga, dan untuk pertokoan, pusat pertokoan dan pasar lingkungan berada di pusat kota. Berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat pelayanan sarana perdagangan di wilayah permukiman sub-urban Kota Luwuk menunjukan bahwa jauh dari

kondisi ideal dan termasuk kategori tidak memenuhi standar pelayanan minimal, sehingga masyarakat melakukan perjalanan berbelanja untuk memenuhi kebutuhannya harus ke pusat kota dengan jarak pencapaian panjang dan lama, yang seharusnya tersedia 0,3 km untuk warung dan toko, dan 2 km untuk pertokoan, pusat pertokoan dan pasar lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi menunjukkan bahwa tingkat pelayanan sarana perdagangan tidak memenuhi standar pelayanan minimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat harus memenuhi kebutuhan dengan kendaraan bermotor, dengan jarak capai rata-rata 8,25 km, yang seharusnya tersedia dalam radius pelayanan 0,5-2 km. Kota secara keseluruhan menjadi tidak nyaman bagi penghuni, karena jarak capai lebih panjang dan lebih lama untuk aktivitas sosial dan ekonomi. Untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga dapat mencapai tingkat pelayanan yang efisien dan efektif dalam penyediaan sarana perdagangan di wilayah permukiman suburban Kota Luwuk, maka diperlukan penyediaan dan peningkatan sesuai dengan standar pelayanan minimal sehingga dapat menunjang penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sarana perdagangan yang ada diharapkan dapat menghantar pada pembauran, artinya bukan penduduk daerah setempat yang dapat menikmati sarana tersebut, melainkan juga penduduk daerah belakang. Dengan demikian penyediaan ini dapat digunakan oleh beberapa lingkungan perumahan dan permukiman secara bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. S. (2014). Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. *RADIAL : Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa Dan Teknologi*, 2(1), 27–31. <https://doi.org/10.37971/RADIAL.V2I1.43>
- Dyah, R. W., Kurniawan, E. B., & Usman, F. (2010). Penataan Permukiman di Kawasan Segiempat Tunjungan Kota Surabaya. *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 2(2), 1–8.
- Koestoer, R. H. (1997). *Perspektif lingkungan desa-kota : teori dan kasus / Raldi H. Koestoer, pendamping . Yanti R. H.. Koestoer | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. UI-Press. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=646564>
- Kolompoy, J. J., Masinambow, V. A., & Niode, A. O. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(4), 28–37.
- Nugroho, C., Agustang, A., & Pertiwi, N. (2022). Dinamika Pertumbuhan Kawasan Permukiman Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(1), 2656–5862. <https://doi.org/10.58258/JIME.V8I1.2664>
- Prihatin, R. B. (2015). Alih Fungsi Lahan di Perkotaan (Studi Kasus di Kota Bandung dan Yogyakarta). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(2), 105–118. <https://doi.org/10.46807/ASPIRASI.V6I2.507>
- Putra, S. M., Latief, R., & Suaeb, I. (2022). Pengaruh Perubahan Morfologi Kota Terhadap Pembentukan Struktur Ruang Kota Kupang. *Urban and Regional Studies Journal*, 4(2), 102–109. <https://doi.org/10.35965/URSJ.V4I2.1465>
- Warsono, A., Soetomo, S., & Wahyono, H. (2009). Perkembangan Pemukiman Pinggiran Kota pada Koridor Jalan Kaliurang, Kabupaten Sleman. *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 1(1), 19–23.
- Wunas, S. (2011). *Kota Humanis Integrasi Guna Lahan dan Transportasi di Wilayah Suburban*. Brilian Internasional.